Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padangsidimpuan

Rahmat Kurniawan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara rahmatkurniasir@gmail.com

Azhar

Politeknik Negeri Medan

Abstract

This research is to find out the perceptions of micro, small and medium enterprises to modern stores, MSME partnerships with modern stores, constraints, and the role of the government in overcoming the problems of modern shops and MSMEs in Padangsidimpuan City. This research is a descriptive qualitative study by conducting in-depth interviews. The results showed the perception of MSMEs towards modern stores had a negative and positive impact. The negative impact, the income of MSMEs has decreased. The positive impact, the presence of modern stores motivates MSMEs to evaluate themselves from modern stores. The partnership established by MSMEs with modern stores is the use of business locations provided by modern stores. The constraints of MSMEs are business capital, human resources, business legality, business permits and products, while the constraints of modern stores are business permits, human resources and partnerships with MSMEs. The role of the City Government of Padangsidimpuan is for modern stores, namely to give an appeal not to add to modern store outlets and to call for partnerships in terms of marketing local MSME products. For MSMEs, facilitate MSMEs with banking institutions in terms of providing venture capital, training and guidance to MSMEs, and making packaging houses.

Keywords: *Impact*, *modern stores*, *MSMB*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap toko modern, kemitraan UMKM dengan toko modern, kendala toko modern dan UMKM, dan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan toko modern dan UMKM di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan persepsi UMKM terhadap toko modern berdampak negatif dan positif. Dampak negatifnya, pendapatan UMKM mengalami penurunan. Dampak positifnya, kehadiran toko modern memberikan motivasi kepada UMKM untuk mengevaluasi diri dari toko modern. Kemitraan yang dijalin oleh UMKM dengan toko modern adalah penggunaan lokasi usaha yang disediakan toko modern. Kendala UMKM adalah modal usaha, sumber daya manusia, legalitas usaha, izin usaha dan produk, sementara kendala toko modern adalah izin usaha, sumber daya manusia dan kemitraan dengan UMKM. Peranan pemerintah Kota Padangsidimpuan adalah bagi toko modern, yaitu memberikan himbauan agar tidak menambah outlet toko modern dan menghimbau untuk melakukan kemitraan dalam hal memasarkan produk lokal UMKM. Bagi UMKM, memfasilitasi UMKM dengan lembaga perbankan dalam hal pemberian modal usaha, pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM, dan membuat Rumah Kemasan.

Kata Kunci: Dampak, Toko Modern, UMKM

Pendahuluan

Pertumbuhan toko modern jenis minimarket seperti Indomaret, dan Alfamidi tentu tidak terlepas atas kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam mendirikan Toko modern. Pendirian minimarket ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 tahun 2008. Pendirian tersebut harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. Analisis tersebut meliputi kajian tentang:

- 1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- 2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- 3. Kepadatan penduduk;
- 4. Pertumbuhan penduduk;
- 5. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- 6. Penyerapan tenaga kerja;
- 7. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- 8. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- 9. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
- 10. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).¹

Berdasarkan peraturan di atas, eksistensi usaha toko modern tidak lerlepas dari analisis kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran toko modern ini diharapkan mampu bersinergi dengan UMKM yaitu, dengan bermitra serta memberikan pembinaan dan pengembangan serta memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Artinya apabila benefit positif yang dihasilkan dari pendirian toko modern lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian toko modern dapat dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, apabila toko modern tetap diizinkan, tanpa dokumen yang lengkap maka apabila muncul efek sosial dan ekonomi, maka Pemerintah sudah harus siap mengambil kebijakan yang tegas untuk menyelesaiakan persoalan tersebut.²

Di Kota Padangsidimpuan, kehadiran toko modern yakni Indomaret dan Alfamidi telah menyebar kebeberapa wilayah yang ada di Kota Padangsidimpuan. Pelaku UMKM turut merasakan dampak positif dan dampak negatif kehadiran toko modern ini. Berdirinya toko modern yang telah masuk di berbagai sudut wilayah, banyak memberikan manfaat di Kota Padangsidimpuan, yakni telah banyak menghemat biaya transportasi dekat dengan konsumen seperti komplek perumahan maupun pemukiman warga. Selain itu juga memberi manfaat ekonomis karena banyak memberi fasilitas diskon sehingga membantu konsumen memperoleh harga yang lebih murah.

Tabel 1 Jumlah Toko Modern dan UMKM

No		Toko modern		Jumlah
110	Kecamatan	Indoma	Alfamid	UMKM
1	Padangsidimpuan Selatan	3	1	423
2	Padangsidimpuan Utara	6	4	975
3	Padangsidimpuan Tenggara	1	1	230
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	-	-	259
5	Padangsidimpuan Batu Nadua	1	1	205
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	-	-	351
Total		11	7	2443

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dakhoir dengan judul eksistensi usaha kecil menengah dan pasar tradisional dalam kebijakan pengambilan pasar modern menyatakan bahwa dampak keberadaan toko modern Alfamart, Foodmart dan Indomart di Palangkaraya memberikan penguatan dan peningkatan omset UMKM (ritel roti) sekitar. Selain itu, dampak lain eksistensi toko modern memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan meningkatkan penghasilan ekonomi tenaga kerja lokal dikarenakan banyak tenaga kerja muda yang berasal dari lokal telah bergabung dengan toko modern tersebut.³

Pentingnya kehadiran toko modern berdasarkan fakta di atas tentu dapat menjadi kunci pengembangan UMKM dan tentu berujung kepada kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Namun demikian, meski dampak eksistensi toko modern sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan,

justru dampak lain yang ditimbulkan oleh eksistensi toko modern jenis minimarket ini ternyata telah mengurangi jumlah pembeli/ konsumen pada kios kecil/ tradisional disekitarnya, sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja dari UMKM tersebut. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah masalah jarak pendirian toko modern. Jarak yang berdekatan dengan pasar tradisional dan UMKM, mengakibatkan iklim bisnis yang tidak sehat dan bahkan dapat mematikan para penjual yang berada di pasar tradional dan UMKM. Hal inilah yang menyebabkan para pelaku UMKM dan penjual di pasar tradisional pada akhirnya mengeluhkan keberadaan toko modern yang berdekatan dengan lokasi mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Akhir:

"Ya gimana ya dek, semenjak ada toko modern di persimpangan jalan yang posisinya hampir berdekatan dengan ruko saya, penjualan saya mengalami penurunan, terus pedagang sembako dan eceran yang lain juga merasakan hal yang sama karena banyak pembeli yang lebih memilih belanja di Indomaret dari pada di ruko saya".⁴

Pendapatan Pak Akhir dan pedagang lainnya per hari sebelum adanya toko modern antara Rp 20.000,00 per hari (terendah) dan tertinggi Rp 2.000.000,00 per hari, namun setelah muncul toko modern maka pendapatan minimal perhari sebesar Rp 20.000,00 dan tertinggi hanya Rp 1.000.000,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pendapatan per hari pada UMKM di pasar tradisional setelah munculnya toko modern.

Berdasarkan hasil penelitian Febrian Pramana Putra, M. Awaluddin, Arief Laila Nugraha dengan judul kajian sebaran dan potensi *minimarket* (Studi Kasus: Kota Semarang) menjelaskan bahwa terdapat 38 titik *minimarket* di Kota Semarang yang tidak sesuai tempat berdirinya atau termasuk dalam radius 500 m dengan UMKM berdasarkan peraturan Walikota No.5 tahun 2013, akibatnya iklim bisnis menjadi kurang sehat sehingga mengancam perekonomian masyarakat sekitar.⁵

Eksistensi toko modern berakibat terhadap penurunan jumlah kinerja UMKM dari segi pendapatan, terbukti dari penurunan jumlah komoditas seperti susu, beras, snack, roti, jenis-jenis minuman, detergen, minyak goreng, telor, sabun, sampo, dan kebutuhan pokok yang lain. Tentu hal ini akan dapat menyudutkan keberadaan kios/UMKM pada aktifitas pasar. Dampak yang paling mengerikan adalah toko/kios/

pasar tradisional mengalami gulung tikar. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Muhammad Maulana menjelaskan APPSI telah melakukan penyisiran ke beberapa pasar Tradisional di sejumlah daerah dan ditemukan berbagai masalah yang cukup rawan dan perlu diatasi secara cepat yaitu berkurangnya jumlah pasar tradisional hingga mencapai dua ribu pasar karena tergerus keberadaan toko modern. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah melihat keberadaan Toko modern yang cukup marak, dan ini merupakan kondisi yang amat memprihatinkan. Persaingan perdagangan antara toko modern dengan usaha kecil disekitarnya bermain menjual mata dagangan yang sama, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari seyogianya menjadi bagian dari kesulitan usaha kecil untuk meraih pasar. Menurunnya konsumen berbelanja ke usaha kecil dapat dianalisis melalui beberapa segi, selain dari sisi jarak yang berdekatan juga dilihat dari sisi konsumen maupun kondisi usaha kecil yang telah yang kurang fasilitas baik secara pelayanan, kondisi toko dan barang-barang yang kurang lengkap maupun barang dagangan yang dijual, disusun dan dipajang acak-acakkan.

Permasalahan lain juga terjadi dalam hal pembinaan dan kemitraan antara UMKM dengan toko modern sebagai syarat untuk dapat berdiri di suatu daerah. Sulitnya memenuhi prosedur dan standarisasi untuk dapat menembus dan menjual produk lokal kedalam sistem toko modern. Hasilnya banyak produk-produk lokal yang ditolak dan tidak dapat dipasarkan di rak-rak toko modern. Tentu dalam hal ini, beberapa persolan di atas dapat menyebabkan ketimpangan terhadap persaingan usaha maka hal itu dapat menyebabkan distorsi pasar. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam hal sangat diperlukan guna melakukan penataan dan pengaturan kembali terhadap toko modern dan UMKM yang ada di Kota Padangsidimpuan dengan tujuan menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Toko Modern

Toko modern merupakan perdagangan ritel/ eceran dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Arti modern sendiri yaitu penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional.⁸ Terdapat tiga jenis toko modern yaitu *minimarket, supermarket*, dan *hypermarket* yang memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana berikut ini:

Tabel 2 Karakteristik Jenis Toko Modern

Uraian	Minimarket	Supermarket	Hypermarket
Barang yang	Berbagai macam	Berbagai macam	Berbagai macam
Diperdagangkan	kebutuhan rumah	kebutuhan rumah	kebutuhan rumah
	tangga termasuk	tangga termasuk	tangga termasuk
	kebutuhan sehari-hari	kebutuhan	kebutuhan sehari-
		sehari-hari	hari.
Jumlah item	<5000 item	5000-25000	>25000 item
		item	
Jenis produk	- Makanan	- Makanan	- Makanan
-	kemasan	kemasan	- Barang-
	- Barang-barang	- Barang-barang	barang
	yang higienis pokok	rumah tangga	rumahtangga
			- Elektronik
			- Busana/pakaian
			- Alat olahraga
Model penjualan	Dilakukakan secara	Dilakukakan	Dilakukakan
	eceran, langsung pada	secara eceran,	secara eceran,
	konsumen akhir	langsung pada	langsung
	dengan cara swalayan	konsumen akhir	pada
	(pembeli mengambil	dengan cara	konsumen akhir
	baran dari rak- rak	swalayan.	dengan cara
	dagangan dan		swalayan.
	membayar di kasir)		
Luas lantai usaha	Maksimal 400 m ²	400-5000 m ²	$>5000 \text{ m}^2$
(berdasarkan			
Perpres No 112 th			
2007)			
Luas lahan parkir	Minim	Standar	Sangat luas
Modal (diluar tanah	s/dRp 200 juta	Rp.200 juta –	Rp.10 Milyar ke
dan bangunan)		Rp. 10 Milyar	atas

Sumber: Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007

Toko modern dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. Perpres 112 tahun 2007 tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perizinan toko modern

dan pusat perbelanjaan selanjutnya diatur dalam sejumlah Peraturan daerah. Toko modern merupakan Industri ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang yang menguntungkan dari bisnis ritel ini.

Secara mikro peran bisnis eceran dapat dilihat sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan langsung dari konsumen akhir terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen, karena dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang orang membeli langsung dari produsen. Bisnis eceran sangat berperan penting dalam menjalankan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Khususnya dalam hal investasi, distribusi, konsumsi, dan indikasi (mengetahui kebutuhan konsumen). Dalam suatu aliran distribusi, pengecer memainkan peran penting sebagai penengah diantara produsen, agen, *supllier* dan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa serta menawarkannya kepada para konsumen, dengan jenis barang-barang yang beragam memungkinkan konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan.

Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil menengah menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang menjelaskan bahwa :

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.¹⁰
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000.¹¹

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50 miliar.¹²

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh Kuncoro, membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut Kuncoro, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). Kuncoro mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. ¹³

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro dengan pekerja 1-4 orang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. usaha kecil dengan pekerja 5-19 orang yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan pekerja 20-99 orang yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

Pada prinsipnya, perbedaaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Di bawah ini akan dijelaskan

tabulasi karakteristik dan perbedaan antara usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3 Perbedaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Formalitas	Beroperasi di sektor	Beberapa	Semua di sektor
		informasi, usaha	beroperasi pada	formal, terdaftar
		tidak terdaftar,	sektor formal,	dan membayar
		tidak/jarang bayar	beberapa tidak	pajak
		pajak	terdaftar, sedikit	
			membayar pajak	
2.	Organisasi	Dijalankan oleh	Dijalankan oleh	Dijalankan oleh
	dan	pemiliki, tidak	pemilik, tidak	manajer
	Manajemen	menerapkan	ada ILD, MOF,	profesional dan
		pembagian kerja	dan ACS	menerapkan ILD,
		internal (ILD),		MOF, dan ACS
		manajemen dan		
		struktur organisasi		
		formal (MOF), dan		
		sistem pembukuan		
		formal (ACS)		
3.	Sifat	Kebanyakan	Beberapa	Semua memakai
	Kesempatan	menggunakan	menggunakan	tenaga kerja dan
	Kerja	anggota-anggota	tenaga kerja	memiliki sistem
		keluarga, tidak		perekrutan formal
		dibayar		2.5 1111.1
4.	Pola Proses	Derajat mekanisasi	Beberapa	Memiliki
	Produksi	sangat rendah/	memakai mesin	mekanisasi yang
		umumnya manual,	terbaru	tinggi dan
		tingkat teknologi		memiliki akses
		sangat rendah		terhadap
5	Orientasi	Hayamaya maniyal	Danyala yana	teknologi tinggi
3	Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk	Banyak yang	Semua menjual ke pasar domestik
	Pasai	ke pasar lokar untuk kelompok	menjual ke pasar domestik dan	dan banyak yang
		berpendapatan	ekspor, dan	diekspor,
		rendah	melayani kelas	melayani kelas
		TCHGan	menengah ke	menengah ke atas
			atas	menengan ke atas
6	Profil	Pendidikan rendah	Banyak	Sebagian besar
	ekonomi dan	dan dari rumah	berpendidikan	berpendidikan
	sosial dari	tangga miskin	baik dan dari	baik dan dari
	pemilik	wiigga iiiiokiii	rumah tangga	rumah tangga
	usaha		non miskin	makmur
7.	Sumber	Kebanyakan	Beberapa	Banyak memakai
	bahan baku	memakai bahan	memakai bahan	bahan baku impor
	dan modal	baku lokal dan uang	baku impor dan	dan memiliki
		pribadi	memiliki akses	akses ke kredit
		_	ke kredit formal	formal

8.	Hubungan	Vahanyalsan tidals	Danviels viene	Cabagian basan
٥.	Hubungan	Kebanyakan tidak	Banyak yang	Sebagian besar
	Eksternal	memiliki akses ke	memiliki akses	memiliki akses ke
		program-program	ke program-	program-program
		pemerintah dan	program	pemerintah dan
		tidak punya	pemerintah dan	mempunyai
		hubungan bisnis	mempunyai	hubungan bisnis
		dengan usaha	hubungan bisnis	dengan usaha
		berskala besar	dengan usaha	berskala besar.
			berskala besar.	
9.	Pengusaha	Rasio jumlah	Rasio jumlah	Rasio jumlah
	Wanita	pengusaha wanita	pengusaha	pengusaha wanita
		terhadap pria sangat	wanita terhadap	terhadap pria
		tinggi	pria cukup tinggi	sangat rendah
10.	Asset	Maks.50 juta	>50-500 juta	>500 juta – 50
				Milliar
11.	Omzet	Maks. 300 juta	>300 juta- 2,5	>2,5 Milliar-50
			Milliar	Miliiar
12.	Tenaga	<4 orang	5-19 orang	20-99 orang
	Kerja			
13.	Motivasi	Bertahan hidup	Banyak yang	Motivasi utama
	berusaha	(survival)	bermotivasi	mencari profit
			mencari profit	-
14.	Latar	Meneruskan usaha	Warisan	Warisan
	Belakang	keluarga, tidak ada	keluarga,	keluarga,
	Pengusaha	kesempatan berkarir	dibekali	memiliki keahlian
		pada bidang lain	keahlian,	dan memanfaatka
			membuka	peluang yang
			lapangan kerja	besar dan aman.

Sumber : Dari berbagai sumber

Perbedaan beberapa kriteria tersebut dapat dimengerti karena alasan kepentingan pembinaan yang spesifik dari masing-masing sektor yang bersangkutan. Tetapi disadari juga bahwa dalam hal beberapa perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan terhadap suatu lembaga peneliti terutama dalam pengambilan sampel penelitian, sehingga hasilnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.

Kemitraan Toko Modern dengan UMKM

Praktik kemitraan usaha antara toko modern dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh toko modern meskipun banyak pihak masih menganggap kemitraan tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Masih banyak pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang belum tersentuh program kemitraan usaha tersebut disebabkan antara lain banyaknya UMKM di Indonesia. Mulai terjalinnya upaya kemitraan antara toko modern dan UMKM sepantasnya patut disyukuri dan didorong agar semakin

berkembang di Indonesia. Pemerintah berperan besar mendorong kemitraan usaha tersebut dengan berbagai cara antara lain mewajibkan pengelola toko modern untuk menyediakan setidaknya 10 % dari luas lantai penjualan bagi UMKM atau menjadikan UMKM sebagai rekanan pemasok barang. ¹⁴

Kemitraan usaha dalam bidang toko modern atau pasar modern secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/ M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemitraan usaha dalam bisnis ritel dengan pola perdagangan umum (*general trading*) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka¹⁵. Kerja sama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1) Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern.¹⁶

Etika Bisnis dalam Islam

Kata etika (ethos) berasal dari bahasa Yunani Ethics yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, adab dan sebagainya. Dan dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai- nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Selain itu etika merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma- norma etik atau etika sering kali dihubungkan dengan moral (moralitas). Dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak. Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdaganngan barang dan jasa. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara. Sentangan misalnya industri

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan syariah dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 148 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan:

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ²⁰

Dalam kandungan ayat Al-Qur'an diatas dijelaskan bahwa persaingan usaha untuk tujuan kebaikan itu diperbolehkan, selama persaingan itu tidak melanggar prinsip syariah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha pesaingnya hancur. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barangnya.²¹

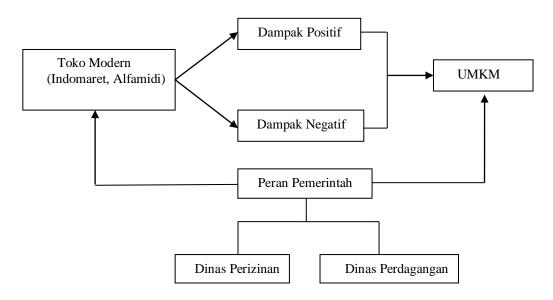
Di dalam surat yang lain, Al-Qur'an juga memperingatkan kepada para pesaing untuk tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah. Hal ini Allah nyatakan di dalam surat At-Takatsur ayat 1-5:

Artinya: "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. ²²

Dalam ayat yang telah disebutkan diatas Allah memperingatkan secara keras agar meninggalkan persaingan semacam itu. Bahkan secara berulang-ulang Allah tegaskan untuk meninggalkan persaingan tersebut. Oleh karena itu, pebisnis Muslim wajibmemahami konsep persaingan yang dianjurkan dalam islam agar tidak terjatuh persaingan yang tidak sehat.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran berdasarkan topik dalam penelitian ini yaitu dampak toko modern terhadap keberadaan usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa kehadiran Toko modern jenis minimarket yaitu Indomaret dan Alfamidi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap keberadaan UMKM. Dampak positif dan dampak negatif toko modern terhadap UMKM dapat dilihat secara sudut pandang sosial maupun ekonomi. Persaingan Usaha antarpengusaha baik itu toko modern maupun UMKM tentu harus memperhatikan etika bisnis agar terwujud iklim bisnis yang sehat. Dalam hal ini peran pemerintah memiliki peran sentral untuk dapat mewujudkan keseimbangan pasar antarpelaku usaha, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Perizinan) maupun Dinas Perdagangan sebagai pelaksana Undang-Undang yang disepakati. Peran pemerintah ini sangat diperlukan apalagi bila terjadi distorsi pasar, maka pemerintah harus mengambil andil sebagai solutif maker atas permasalahan yang terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendapatkan fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis dampak toko modern terhadap usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yaitu pelaku usaha toko modern, pelaku UMKM dan dari pihak Pemerintahan Kota Padangsidimpuan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berhubungan dengan toko modern UMKM. Adapun daftar Informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 4 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Profesi	Keterangan (Wawancara)
1.	Ade	Usaha Ade/UMKM	13 Desember 2018
2.	Hariyadi Lubis	Toko Merlin/UMKM	13 Desember 2018
3.	Bahren	Usaha Jus/ UMKM	13 Desember 2018
4.	Farida	Usaha Hapohan/UMKM	13 Desember 2018
5.	Aisyah	Toko Aisyah/UMKM	13 Januari 2019
6.	Nisa	Teh Roci/UMKM	13 Desember 2018
7.	Noviarti	Toko Amia/UMKM	14 Desember 2018
8.	Linda Pane	Najogi Mart/UMKM	14 Desember 2018
9.	Maisaroh	Jus Kita-Kita/UMKM	14 Desember 2018
10.	Ernawati Daulay	Toko Rico/UMKM	15 Desember 2018
11.	Rudy Irwansyah	Marketing Alfamidi	26 Desember 2018
12.	Ardianto	Kepala Toko Alfamidi	3 Januari 2019
13.	Ridwan Pasaribu	Dinas Perdangan	3 Januari 2019
14.	Dian Afriany	Dinas Perizinan	3 Januari 2019
15.	Jamilah	Kepala Toko Alfamidi	4 Januari 2019

16.	Chintya Dewi	Marketing Indomaret	13 Januari 2019

Sumber: Hasil wawancara

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah melakukan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian dan kajian kepustakaan berdasarkan kajian penelitian yaitu dampak toko modern terhadap usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti akan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap temuan penelitian tersebut.

Persepsi UMKM terhadap keberadaan Toko Modern di Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara, dari 8 (delapan informan) yang diwawancarai, ada 5 (lima) informan yang memiliki persepsi bahwa kehadiran toko modern di Kota Padangsidimpuan berdampak negatif terhadap usaha mereka. Kemudian 3 (tiga) informan lagi menyatakan persepsinya bahwa tidak bergitu berdampak terhadap bagi usaha mereka. Kedelapan informan ini merupakan pelaku UMKM yang berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Tabel 5 Pendapatan pelaku UMKM sebelum dan sesudah Toko modern

	10010 1 011000 0000011		iii ddii bebaaaii 10110 iiiodeiii
No	Nama Informan	Pendapatan UMKM/ hari sebelum dan sesudah hadirnya toko modern (Indomaret dan Alfamidi)	
		Sebelum Toko	Sesudah
1.	Usaha Ade	Rp. 3-5 juta	Rp. 1-2 juta
2.	Toko Merlin	Rp. 500 ribu – 1 juta	Rp. 100-500 ribu
3.	Toko Amia	Rp. 4-5 juta	Rp. 1-2 juta
4.	Najogi Mart	Rp. 7-8 juta	Rp. 4 juta
5.	Usaha Rico	Rp. 8-10 juta	Rp. 5-6 juta

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel 3 tentang pendapatan pelaku UMKM sebelum dan sesudah toko modern menjelaskan bahwa para informan yang memiliki persepsi bahwa sejak kehadiran toko modern yang zonasinya berdekatan dengan UMKM berdampak negatif kepada usaha mereka. Dampaknya yaitu menurunnya pendapatan para UMKM karena usaha mereka tidak dapat bersaing dengan Indomaret/ Alfamidi yang berdiri disekitaran mereka.

Peneliti memandang bahwa pendirian toko modern yaitu Indomaret dan Alfamidi belum memperhatikan aspek zonasi pendirian toko modern jenis minimarket berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdangan No. 53 tahun 2008. Pemerintah Kota Padangsidimpuan harus berperan melakukan penertiban terhadap pendirian gerai minimarket, agar kinerja para UMKM tidak menurun. Sebagaimana Perpres No. 112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 yang tentang peraturan zona, yang diharapkan mampu melindungi pedagang tradisional. Begitu juga halnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan, dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Selain itu, dampak positif yang dirasakan oleh UMKM dijelaskan oleh persepsi ketiga informan yang menjelaskan bahwa kehadiran toko modern seperti Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidimpuan tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan mereka dikarenakan mereka dapat mempertahankan pelanggan dengan memperhatikan kelengkapan barang, harga yang seimbang juga pelayanan yang baik. Selain itu mereka berpandangan bahwa kehadiran toko modern di Kota Padangsidimpuan justru berdampak positif kepada pelaku UMKM untuk dapat berbenah dan dapat mengevaluasi usahanya untuk dapat berkembang seperti toko modern.

Kemitraan UMKM dengan Toko Modern di Kota Padangsidimpuan

Kehadiran Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidimpuan tidak sepenuhnya memberikan dampak yang negatif terhadap pelaku UMKM. Karena Alfamidi maupun Indomaret membuka peluang untuk dapat bermitra baik sebagai pemasok barang maupun menyewa tempat yang ada di halaman parkir Alfamidi dan Indomaret. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait kemitraan UMKM di Kota Padangsidimpuan yaitu kemitraan yang dibangun oleh pelaku UMKM dengan toko modern yaitu Indomaret dan Alfamidi berbentuk penyediaan lokasi usaha dari toko modern. Untuk penyediaan lokasi usaha ini Alfamidi memiliki program "Tenan" dan program "Sewa Teras" untuk Indomaret. Dalam

hal ini pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan ruang usaha sesuai peruntukkan yang telah disepakati. Adapun daftar usaha pelaku UMKM yang bermitra dengan Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidimpuan berbentuk pemanfaatan lokasi usaha oleh Toko modern adalah

Tabel 6 Daftar Kemitraan UMKM dengan Toko Modern

No	Toko	Nama Usaha	Alamat
	modern		
1.	Alfamidi	Pisang Crispy	Kenanga, Psp Utara
		Choco Drink	Ahmad Yani, Psp Utara
		Sari Tebu Murni	Ahmad Yani, Psp Utara
		Juice Kita-Kita	H.T. Rizal Nurdin, Batunadua
		Donat	Soripada Mulia, Psp Utara
		Sop Buah	Soripada Mulia, Psp Utara
		Jus dan Sop Buah	SM. Raja, Psp Selatan
2	Indomaret	Royal Tea & Roci	Kenanga, P. Sidimpuan Selatan
		Kuch Kuch Ho Tahu	Sudirman Sadabuan, Psp Utara
		Kuch Kuch Ho Tahu & Tempe	Soripada Mulia, Psp Utara

Sumber: Hasil Observasi

Menurut peneliti, kemitraan dalam hal penggunaan lokasi usaha Indomaret dan Alfamidi sudah cukup baik, secara ekonomi menambah pendapatan masyarakat dan secara sosial dapat memberikan lowongan kerja kepada pemuda setempat untuk dapat mengembangkan jiwa berwirausaha sehingga dapat mengurangi pengangguran. Namun dalam hal kemitraan secara memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemiliki barang, merek toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti saat ini belum ada baik terhadap Indomaret maupun Alfamidi yang ada di Kota Padangsidimpuan, padahal jumlah UMKM di Kota Padangsidimpuan mencapai 2443 UMKM. Tentu hal ini merupakan hal yang harus dievaluasi baik dari sisi UMKM maupun dari Pemerintah, sehingga kedepan terjalin kemitraan yang baik antara UMKM dengan toko modern di Kota Padangsidimpuan.

Menurut peneliti, sejumlah persyaratan dagang (*trading terms*) yang diberlakukan oleh Indomaret dan Alfamidi belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh UMKM Kota Padangsidimpuan dikarenakan banyak kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti modal, kompetensi SDM yang lemah, produktifitas UMKM yang minim dan lain-lain. Dalam hal ini UMKM harus dapat berbenah agar kedepan UMKM dapat bermitra dengan Alfamidi dan Indomaret di Kota Padangsidimpuan.

Kendala-kendala UMKM dan Toko Modern di Kota Padangsidimpuan

Perkembangan UMKM dan toko modern di Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa kendala sehingga menghambat untuk dapat memajukan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, adapun kendala-kendala UMKM di Kota Padangsidimpuan adalah :

- 1) Usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan hanya sebagian kecil yang memiliki legalitas badan hukum dan izin usahanya.
- 2) Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia para UMKM mengembangkan usahanya.
- 3) Produk-produk UMKM belum memiliki kemasan yang baik dan label, sementara untuk cita rasa memiliki daya saing yang baik.
- 4) Minimnya permodalan usaha dan masih banyak pelaku usaha yang belum "Bankable" atau masih takut berurusan dengan Bank padahal potensi usahanya sudah baik.
- 5) Pengolahan produk UMKM masih menggunakan teknologi tradisional sehingga produktifitasnya masih minim.
- 6) Belum adanya pembukuan/ laporan keuangan UMKM, modal usaha dan keuangan rumah tangga masih bergabung.

Beberapa alasan di atas tentunya sangat mempengaruhi para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kendala-kendala ini tentu harus dapat dievaluasi, agar UMKM dapat berbenah memperbaiki usahanya. Kemudian selain UMKM, toko modern yang ada di Kota Padangsidimpuan seperti Alfamidi dan Indomaret juga memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya yaitu:

1) Sulitnya mendapatkan izin usaha toko modern di Kota Padangsidimpuan.

- 2) Banyaknya pungutan-pungutan liar oleh oknum terhadap konsumen Alfamidi, seperti pungutan parkir liar dan lain-lain.
- 3) Kemitraan dengan pelaku UMKM sebagai pemasok di Kota Padangsidimpuan yang masih minim, dikarenakan ketidakmampuan pelaku UMKM menembus standarisasi oleh Alfamidi dan Indomaret.
- 4) Sumber daya manusia yang kurang maksimal jika ditempatkan di daerah dalam upaya pengembangan toko modern. Seperti kepala toko yang ada di Medan kemudian ditugaskan ke Kota Padangsidimpuan.

Pada dasarnya, kendala-kendala yang dirasakan oleh UMKM dan toko modern yang mengembangkan usaha di Kota Padangsidimpuan merupakan tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Kendala-kendala tersebut harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga ke depan UMKM dan toko modern dapat berbenah ke arah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan perekonomian Kota Padangsidimpuan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah mengatasi permasalahan Toko Modern dan UMKM di Kota Padangsidimpuan

Menyikapi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dan toko modern di Kota Padangsidimpuan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di bidang Pemerintahan Kota Padangsidimpuan, yaitu:

a. Bagi Toko Modern

Peranan pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu menghimbau kepada Indomaret dan Alfamidi untuk tidak menambah gerai lagi dan membangun kemitraan dengan UMKM Kota Padangsidimpuan guna menciptakan iklim usaha yang stabil. Sebagaimana himbauan tersebut disampaikan secara administratif berbentuk surat himbauan yaitu:

- 1) Surat nomor : 800/ 1089/ DPMPTSP/ 2018 tentang himbauan untuk tidak menambah outlet/ gerai baru Indomaret di Kota Padangsidimpuan.
- 2) Surat nomor: 800/1090/ DPMPTSP/2018 tentang himbauan kerjasama antara outlet Alfamidi dengan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM di Kota Padangsidimpuan.

b. Bagi UMKM

Peranan pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan yaitu :

- 1) Di tahun 2017-2018, Dinas Perdangan Kota Padangsidimpuan telah melakukan sosisalisasi kepada para UMKM sekaligus memfasilitasi UMKM dengan Perbankan untuk pemberian modal usaha dengan program Permaisuri (Perempuan Mandiri dan Suri Tauladan) dan Program Kredit Usaha Rakyat oleh beberapa Bank yang ditunjukan pemerintah pusat.
- 2) Melakukan pelatihan tenun melalui bidang perindustrian dan dipromosikan pada pameran-pameran seperti di PRSU atau pameran lokal.
- 3) Di tahun 2019 ini, Dinas Perdagangan akan membuat Program Rumah Kemasan untuk memperbaiki kemasan produk UMKM menjadi berkualitas.
- Melakukan kegiatan bordil terhadap produksi makanan ringan dengan memberikan perlengkapan-perlengkapan guna efektifitas produksi yang dijalankan.
- 5) Menyikapi keberadaan Toko modern seperti Indomaret dan Alfamidi yang ada di Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2019 ini, Dinas Perdagangan akan melakukan sosialisasi terhadap toko modern dan UMKM, dan memfasilitasi untuk melakukan MoU dalam hal menjalin kerjasama antara Toko modern dan UMKM lokal juga.
- 6) Mengawasi produk-produk Toko modern yang kadaluarsa untuk memperhatikan dan memastikan keamanan konsumen.

Kesimpulan

Persepsi UMKM terhadap toko modern adalah berdampak negatif dan positif. Dampak negatifnya, pendapatan UMKM mengalami penurunan. Dampak positifnya, kehadiran toko modern memberikan motivasi kepada UMKM untuk dapat berbenah dan mengevaluasi diri dari toko modern. Kemitraan yang dijalin oleh UMKM dengan toko modern adalah penggunaan lokasi usaha yang disediakan oleh toko modern, dengan program "Tenan" dan program "Sewa Teras". Tetapi dalam hal kemitraan dalam hal pemasaran produk lokal UMKM Kota Padangsidimpuan belum ada. Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha, sumber daya manusia, legalitas usaha, izin usaha dan produk. Sementara kendala yang dihadapi oleh toko modern adalah masalah izin usaha, sumber daya manusia dan kemitraan dengan UMKM. Peranan pemerintah Kota

Padangsidimpuan untuk mengatasi permasalahan UMKM dan toko modern adalah Bagi toko modern yaitu memberikan himbauan agar tidak menambah outlet toko modern dan menghimbau untuk melakukan kemitraan dalam hal memasarkan produk lokal UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya beli melalui pemberdayaan melalui koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Padangsidimpuan. Bagi UMKM, memfasilitasi UMKM dengan lembaga perbankan dalam hal pemberian modal usaha, pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM, dan membuat rumah Kemasan.

Catatan

¹Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²Jun Ramadhani, Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.

³Ahmad Dakhoir, Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 14, No.01, Juni 2018, h. 38

⁴ Akhir, pedagang kelontong, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, pada tanggal 29 Oktober 2018.

⁵ Febrian Pramana Putra, M. Awaluddin, Arief Laila Nugraha, Sebaran dan Potensi Minimarket (Studi Kasus: Kota Semarang), dalam Jurnal Geodesi, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014.

⁶Pebrianto Eko Wicaksono, 2.000 Pasar Tradisional Lenyap dari Peredaran, http://pedagangpasar. Org/2015/12/2-000- pasar-tradisional-lenyap-dariperedaran.com diakses pada tanggal 01 Nov 2018.

⁷Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolii dan Persaingan Tidak Sehat.

⁸Moh Irham Triyuda, Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket, dalam jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017.

⁹ Devi Puspitassari, dkk, *Membuka Usaha Ritel/Eceran*, (Jakarta : Inti Prima Promosindo, 2012), h. 5

¹⁰Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹²Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹³Mudiarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*. (Jakarta, Erlangga: 2010) h. 185

¹⁴Ayudha D. Prayoga, et.al., Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), h. 53.

¹⁵Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdangan No. 53 tahun 2008.

¹⁶Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdangan No. 53 tahun 2008.

¹⁷Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manejemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 3. ¹⁸Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*,(Bandung: Al- Fabeta,1994), 18

- ¹⁹Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah*, dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 2011, h. 146.
- ²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma Examedia, 2009), h.23.
- ²¹M. Ismail Yusanto dan M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.96.
 - ²²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., h.600.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. 1994. Ajaran Islam dalam Bisnis. Bandung: Al-Fabeta.
- Dakhoir, Ahmad. Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 14, No.01, Juni 2018.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Sygma Examedia.
- Kuncoro, Mudjarat. 2010. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Prayoga, Ayudha D. et.al. 2000. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Putra, Febrian Pramana, M. Awaluddin, Arief Laila Nugraha, *Sebaran dan Potensi Minimarket (Studi Kasus : Kota Semarang)*, dalam Jurnal Geodesi, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014.
- Rahardjo, Dawan. 1990. Etika Ekonomi dan Manejemen. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ramadhani, Jun. Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.
- Saifullah, Muhammad. *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah*, dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 2011.
- Triyuda, Moh Irham. Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket, dalam jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017.

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolii dan Persaingan Tidak Sehat.
- Wicaksono, Pebrianto Eko. 2000 Pasar Tradisional Lenyap dari Peredaran, Lihat http://pedagangpasar.Org/2015/12/2-000-pasar-tradisional-lenyap-dariperedaran.com diakses pada tanggal 01 Nov 2018
- Yusanto. M. Ismail dan M. Karebat Widjajakusuma. 2002. Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Press.